

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/PN Met)

**Oleh
Cindy Ajeng Dwindasari**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak negatif dari narkotika sangatlah dahsyat sehingga para pengguna narkotika sulit untuk keluar dari belenggu narkotika. Sering kali pelaku kejahatan narkotika yang telah di pidana dan ketika telah selesai menjalani hukumannya malah melakukan kejahatannya kembali,.Seolah pidana yang telah dijatukan oleh hakim tidak membuat efek jera. Pengulangan terhadap tindak pidana disebut *Residive*, atau yang lebih dikenal dengan istilah Residivis. Pelabelan residivis bertujuan untuk menjadikan dasar bagi Hakim untuk menjatukan sanksi pidana yang lebih berat untuk menimbulkan efek yang lebih jera.Dan dalam kasus yang penulis angkat penulis tertarik untuk menganalisa unsur unsur pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim menjatukan sanksi pidana yang lebih ringan terhadap kasus Residivis Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa pada putusan Nomor :169/Pid.Sus/2021/PN Met. dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan sanksi pidana lebih ringan terhadap Residivis Narkotika.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data peneliti menggunakan Data Primer dan Data Sekunder , dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu mengklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Metro.

Cindy Ajeng Dwindasari

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh kemudian penulis menarik kesimpulan bahwa Hakim berpedoman pada “Asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang tertulis Pasal 6 (Ayat 2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana pada asas tersebut dijelaskan bahwa suatu kesalahan haruslah dibuktikan dan melihat apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Bahwa sebelum memutuskan suatu perkara hakim terlebih dahulu melihat dan mempertimbangkan; a). Adanya kemampuan bertanggung jawab, b). Hubungan batin antara si pembuat dan Perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), c). Tidak adanya al-adaanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan pada Perkara Putusan Nomor:169/Pid.Sus/2021/PN Met adalah jangka waktu pengulangan nya kemudian adanya penjatuhkan pasal yang berbeda antara 2 putusan tersebut dan jumlah barang bukti.

Kata kunci; Putusan , Residivis, Narkotika

ABSTRACT

BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST NARCOTICS RECIDIVISTS

(Decision Study Number: 169/Pid.Sus/2021/PN Met)

**By
Cindy Ajeng Dwindasari**

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain, and can lead to dependence. The negative impact of narcotics is so powerful that it is difficult for narcotics users to get out of the shackles of narcotics. Often the perpetrators of narcotics crimes who have been convicted and when they have finished serving their sentence instead commit the crime again. The repetition of a crime is called a recidive, or better known as a recidivist. The labeling of recidivists aims to make the basis for judges to impose heavier criminal sanctions to create a more deterrent effect. And in the cases that the authors adopt, the authors are interested in analyzing the elements of criminal responsibility and the basis for consideration of judges imposing lighter criminal sanctions on cases of narcotics recidivists. . The problem in this research is how is the criminal responsibility of the defendant in decision Number: 169/Pid.Sus/2021/PN Met. and what is the basis for the judge's considerations in imposing lighter criminal sanctions on Narcotics Recidivist.

The problem approach used is a normative juridical approach. The research data sources used Primary Data and Secondary Data, by studying the data obtained from interviews and from literature studies, books, documents, and laws and regulations related to the issues to be discussed. Next is to clarify according to the problem under study, then the data is compiled and analyzed using a descriptive method. The resource persons in this study were judges at the Metro District Court. The research location is the Metro District Court.

From the results of the interviews that the authors obtained, the authors draw the conclusion that the judge is guided by the "principle of no crime without fault" written in Article 6 (Paragraph 2) of the Judicial Powers Act. Which on this

Cindy Ajeng Dwindasari

principle explains that an error must be proven and see whether the elements of criminal responsibility have been fulfilled. Whereas before deciding a case the judge first looks at and considers; a). There is the ability to be responsible, b). no excuses.

The basic for the judge's consideration for imposing a lighter criminal sanction in Case Decision Number:169/Pid.Sus/2021/PN Met is the repetition period then there is a different article imposition between the 2 the verdict and the amount of evidence

Keywords; Decision, Recidivist, Narcotics